

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UD Negara Republik Indonesia 1945 didalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Oleh karena itu Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum. Hal ini berarti Indonesia adalah negara yang kehidupannya diatur dan dikelilingi oleh norma-norma hukum. Oleh karena itu, hukum harus benar-benar tegak, sebagai jaminan dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang dalam kehidupannya selalu bermasyarakat dan mengadakan hubungan antar satu dengan lainnya. Hal ini dilakukan agar manusia dapat saling memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam dan tidak mungkin dipenuhi sendiri. Hubungan semacam ini akan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik di antara mereka. Hak dan kewajiban yang timbul semestinya dipenuhi oleh masing-masing pihak agar hubungan pergaulan tersebut dapat berjalan dengan serasi, tertib, dan harmonis.

Manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*conflict of interest*)

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945

diantara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itulah, hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.²

Manusia yang mengalami konflik atau sengketa dan tidak dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, maka akan membawa perkaranya kedepan pengadilan. Dalam hal ini hukum yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusan.

Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.³

Tuntutan hak untuk memperoleh perlindungan hukum ini yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" ada dua

² Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta:Gama Media, hal.6.

³ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hal.2.

macam yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan.

Dalam kenyataannya banyak masyarakat yang mengajukan tuntutan hak baik berupa gugatan maupun permohonan, karena dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai, masyarakat yang mengadakan hubungan berupa perjanjian, seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang dalam pelaksanaannya terjadi masalah, serta tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka pengadilan menjadi tempat untuk mencari perlindungan hukum dan mencari keadilan.

Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.⁴

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa pihak-pihak dalam perjanjian tersebut harus memberikan prestasinya masing-masing, bagi pihak penyewa harus menyerahkan pembayaran sesuai dengan yang disepakati dan pihak yang menyewakan harus menyerahkan objek sewa setelah pihak penyewa menyerahkan pembayarannya. Jika dalam perjanjian telah disertakan syarat-syarat pembayaran dan kapan perjanjian itu berakhir maka para pihak wajib untuk menaatinya karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁴ Dalam pasal 1548 KUH Perdata

Oleh sebab itu jika pihak penyewa tidak menaati isi perjanjian mengenai waktu berakhirnya sewa menyewa dan tidak juga menyerahkan kembali objek sewa kepada pihak yang menyewakan maka dapat dikatakan pihak penyewa itu lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan prestasi secara layak (wanprestasi), maka pihak yang menyewakan dapat menuntut untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati.

Apabila setelah pihak yang menyewakan itu secara baik meminta penyerahan kembali objek sengketa namun tidak juga ada itikad baik dari pihak penyewa serta telah merugikan pihak yang menyewakan maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencari keadilan dan menyelesaikan sengketanya.

Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk kedua belah pihak yang tengah berperkara. Jika pihak penggugat merasa bahwa pihak tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara meskipun telah diselesaikan melalui pengadilan maka pihak penggugat dapat meminta dalam petitumnya agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Pasal 180 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan lebih dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku untuk hal itu berkekuatan

bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan pasti demikian juga jikalau tuntutan sementara dikabulkan tambahan pula dalam perselisihan hak milik. Oleh sebab itu penggugat dapat mengajukan pada pengadilan agar putusan itu dapat dijalankan lebih dahulu. Putusan semacam ini lebih dikenal dengan Putusan Serta Merta atau *Uit Voerbaar Bij Voorraad*.

Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 bahwa Mahkamah Agung memberi petunjuk yaitu Ketua pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat dibawah tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut UU tidak mempunyai kekuatan bukti,
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah,
- c. Gugatan sewa menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik,
- d. Pokok gugatan tentang pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv,
- f. Gugatan berdasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan pokok gugatan yang diajukan,
- g. Pokok gugatan mengenai bezitsrecht.

Sehingga penggugat dengan pokok perkara seperti diatas dapat mengajukan gugatan dengan petitum Putusan dapat dijalankan lebih dahulu. Kemudian hakim dapat mempertimbangkan bagaimanakah seharusnya perkara itu diputuskan, karena hakim memutus berdasarkan keadilan yang benar dan dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, bahwa hendaknya hakim dalam memutus putusan serta merta selalu memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2000 terutama mengenai pelaksanaan putusan serta merta.

Setiap kali melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama”. Oleh sebab itu tanpa jaminan, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Hal ini berarti meskipun telah diputus oleh pengadilan dalam pelaksanaannya tidak semua putusan serta merta dapat langsung dilaksanakan eksekusinya, karena Mahkamah Agung telah mensyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi, yang tanpa adanya jaminan tersebut maka tidak dapat dilaksanakan eksekusinya.

Putusan serta merta ini memiliki prosedur tersendiri dalam pelaksanaannya meskipun hakim telah memutus gugatan dengan putusan serta merta.

Berdasarkan uraian penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi ini dengan judul: **PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM SUATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**

B. Pembatasan Masalah

Dalam Penulisan skripsi ini penulis akan mengemukakan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, agar lebih terarah pada pokok permasalahan yang diteliti dan tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembahasan ini akan dibatasi pada Pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dalam suatu Perkara Perdata yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta.

C. Rumusan masalah

Rumusan berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dengan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*)?
2. Bagaimanakah pelaksanaan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) setelah hakim menjatuhkan putusan?
3. Hambatan-hambatan apakah yang muncul dalam eksekusi putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dengan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) setelah hakim menjatuhkan putusan.
3. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam eksekusi putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

E. Manfaat Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terkait dengan putusan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* atau putusan serta merta dalam suatu perkara perdata.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh masyarakat terutama yang sedang berperkara di pengadilan negeri terkait dengan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan putusan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* atau putusan serta merta dalam suatu perkara perdata.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi didalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada berlaku saat ini.⁵ Sehingga dapat diketahui pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dalam suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.⁶ Jenis penelitian ini digunakan karena penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai pelaksanaan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

3. Lokasi Penelitian

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, Hal. 250.

⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 35.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta karena lokasinya yang dekat dengan domisili penulis, selain itu karena di wilayah Surakarta mengenai Pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) pernah terjadi sehingga penulis memilih Pengadilan Negeri Surakarta menjadi tempat untuk melakukan penelitian.

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan dan fakta tentang pelaksanaan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) yang diperoleh dari hasil wawancara di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, bahan dari kepustakaan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai.⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan juru sita yang melaksanakan eksekusi dilapangan. Dengan demikian penulis lebih mudah dalam menganalisis data yang diperoleh.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Khususnya Yurisprudensi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan Analisis Data Kualitatif, yaitu analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan, wawancara, bahan tertulis berupa Undang-undang, dokumen, buku-buku dan lain-lain yang

⁷ M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hal. 25.

kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, mencari pemecahannya dan menarik kesimpulan, maka dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dan memberi gambaran secara jelas maka penulis membagi dalam empat bab yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasan dan Penutup ditambah Daftar Pustaka dan Lampiran.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Hak Milik
 - 1. Pengertian Hak milik
 - 2. Ciri-Ciri Hak milik

3. Cara memperoleh Hak Milik

- B. Tinjauan Tentang Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa
2. Syarat Sahnya Sewa Menyewa
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa
4. Berakhirnya Sewa Menyewa

- C. Tinjauan tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

- D. Tinjauan Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan
2. Macam-Macam Jaminan

- E. Tinjauan tentang Putusan

1. Pengertian Putusan
2. Macam-Macam Putusan Hakim
3. Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*)

- F. Tinjauan tentang Pelaksanaan/Eksekusi

1. Pengertian Pelaksanaan/Eksekusi
2. Jenis-Jenis Pelaksanaan/Eksekusi
3. Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta
 Nomor.128/Pdt.G/2000/PN. Ska

B. Pembahasan

1. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dengan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).
2. Pelaksanaan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) setelah hakim menjatuhkan putusan.
3. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam eksekusi putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran